

**BAB IV**  
**FAKTOR KENDALA PARTAI POLITIK PADA**  
**PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT KAJIAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG PARTAI POLITIK**  
**(STUDI KASUS DPD PARTAI KEADILAN**  
**SEJAHTERA KOTA CILEGON)**

**A. Pelaksanaan Pendidikan Politik Yang Dilakukan Dewan  
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  
Kota Cilegon.**

Bukan perkara yang instan untuk meneliti suatu partai politik, dimana sebelum melakukan penelitian penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan penulis lontarkan baik pada ketua partai, Sekertaris umum maupun kader partai karena penulis harus menyiapkan betul-betul beberapa pertanyaan yang bisa mempersentasikan keaktifan dan partisipasi mereka dalam politik. Dalam penelitian penulis lakukan penulis melakukan metode wawancara, menurut Esterbeg wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>1</sup>

Dalam UU No. 2 Tahun 2011 pasal 11 ayat (1) huruf a tentang partai politik dimana partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 31 ayat (1) partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan keadilan gender dengan tujuan antara lain: a. meningkatkan kesadaran hak dan tanggung kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara, b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Ayat (2) pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.<sup>2</sup>

Artinya seluruh partai politik di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan materi-materi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai partai politik dengan baik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

---

<sup>1</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 231

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai politik edisi 2011

membuat susunan kepengurusan partai mulai dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan pimpinan Cabang, hingga Ranting Cabang.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil salah satu tempat penelitian di kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kota Cilegon. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon Abdul Goffar, S.H. Pendidikan Politik adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap partai politik khususnya oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai partai kader, Partai Keadilan Sejahtera berkewajiban untuk menyadarkan para kader bahwa mereka adalah para pelayan rakyat, semua program yang disusun harus berorientasi pada rakyat.<sup>3</sup>

Adapun latar belakang Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan pendidikan politik, berdasarkan hasil wawancara kepada ketua DPD PKS kota cilegon yaitu bapak abdul ghofar, bahwasannya:.

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Abdul Goffur, di Kantor DPRD Kota Cilegon ruang Fraksi PKS, Senin, 18 Maret 2019, (jam: 11.00 WIB)

pks itu unik tidak hanya berbicara mengenai politik saja tetapi juga berbicara mengenai nilai-nilai keIslaman secara keseluruhan. bagi PKS politik hanya bagian kecil saja karna PKS lebih kepada nilai-nilai Islamnya. sesungguhnya kita mengajak masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai kesilaman dengan dilaksanakannya Pertemuan pekanan baik dari simpatisan ataupun yang lain.

Intinya banyaknya pertemuan pekanan baik dalam simpati Islam atau gejala public dari situlah disampaikan terkait permasalahan masyarakat, bagaimana menyikapinya , oleh sebab itu digagaslah oleh pks. Dimana pks tidak hanya bergelut kebidang politik (pemilu) tetapi juga dalam nilai-nilai Islam (berda'wah), tidak hanya berda'wah tetapi juga melakukan kegiatan langsung dimasyarakat (baksos).<sup>4</sup>

Dengan latar belakang ini dapat dinyatakan bahwa PKS sebagai partai da'wah, partai ini dalam kebijakannya secara serius melakukan kegiatan syiar Islam dibidang da'wah kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan itu PKS berpandangan bahwa:

Hasil wawancara kepada Sekertaris ferry budiman pandangan bapak tentang pendidikan politik masyarakat

Partai politik sebagai partai dimana partai pks mengidentifikasi partainya senagai partai da'wah. Dengan tujuan mendidikan masyarakat terkait partai politik karna memang kondisi da'wah yang mengajak atau menyuruh

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Abdul Goffur, di Kantor DPRD Kota Cilegon ruang Fraksi PKS, Senin, 18 Maret 2019, (jam: 11.00 WIB)

masyarakat untuk lebih baik begitu juga dengan pembelajaran politik sebagaimana dikenal pada umumnya partai politik disini dengan mengenal gagasan seperti penghapusan pajak motor dibawah 150 atau sim seumur hidup segingga dalam hal ini masyarakat bisa mengenal gagasan dengan mematuhi peraturan. kepemimpinan yang merupakan manifestasi dari jika khalifah.<sup>5</sup>

Adapun tujuan pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon adalah untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan maupun saran keluar, sasaran ke dalam yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik di dalam internal partai yaitu upaya meningkatkan kemampuan dan peranan kader atau anggota partai melalui pembinaan sehingga dapat mewujudkan kader PKS yang bersih, peduli dan professional sesuai dengan selogan partai serta memiliki militasi yang tinggi. Sasaran ke luar yang berkaitan dengan pendidikan politik yaitu upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik secara utuh dan menyeluruh.

Hasil wawancara kepada ketua DPD PKS yaitu abdul ghofar bahwa:

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Sekertaris Umum DPD PKS Kota Cilegon, bapak Ferry Budiman, di Kantor DPD Kota Cilegon, Senin, 18 Maret 2019, ( Jam: 08.54)

Tujuan pendidikan politik perinsip pertamanya seseorang mengetahui atau memahami tugasnya sendiri yaitu sebagai hamba allah dan sebagai khalifah yang besifat pribadi dalam pks disebut mutaba'ah (kegiatan harian) seperti shalat berjamaah, puasa sunnah karena itu kita mengajak masyarakat menjadi hamba allah yang seutuhnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti melalui dokumentasi dan wawancara, terungkap bahwa pendidikan yang dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon meliputi berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi, dan kegiatan sosial.

Adapun kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon ini diantaranya MABIT ( Malam Bina Iman dan Taqwa), dalam acara MABIT ini, disampaikan materi mengenai Manajemen shalat Khusyu oleh Ustad Anughra dari Kecamatan Citangkil, acara MABIT diselenggarakan dengan tujuan memperkuat ruhiyah kader PKS. Agenda MABIT ini merupakan bagian dari pembekalan ruhiyah kader untuk menyambut peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab dan Kader PKS bersiap dengan sungguh-

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Abdul Goffur, di Kantor DPRD Kota Cilegon ruang Fraksi PKS, Senin, 28 Maret 2019, (jam: 09.00 WIB)

sebenarnya menyambut bulan Ramadhan. Selain kegiatan MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa) PKS juga memiliki program rutin pekanan yang berupa Ta'lim Rutin Partai (TRP) untuk para kadernya. Ta'lim ini berisi kajian keIslaman dan mengupayakan pengalamannya. Diungkapkan Bapak Abdul Goffur selaku ketua DPD PKS Kota Cilegon:

Kegiatan MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa) merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh bidang kaderisasi untuk membina dan memberi penguatan dari sisi ruhiyah (iman, rohani) kepada para kader PKS. Selain kegiatan MABIT ini PKS juga memiliki program rutin pekanan yang berupa Ta'lim Rutin Partai (TRP).<sup>7</sup>

Dalam rangka mendapat simpati dari masyarakat serta memberi informasi pada masyarakat tentang kegiatan politik dan syiar Islam dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon, antara lain kegiatan pawai ramadhan yang diselenggarakan sebelum bulan ramadhan. Kegiatan ini biasanya berjalan melewati jalan-jalan kampung dari kampung yang satu ke kampung yang lainnya. dimana kegiatan ini rutin dilakukan oleh PKS Kota Cilegon setiap tahunnya

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Abdul Goffur, di Kantor DPRD Kota Cilegon ruang Fraksi PKS, Senin, 28 Maret 2019, (jam: 09.00 WIB)

sebagai ciri khas partai da'wah. Selama perjalanan isi dengan tips sehat puasa dan jadwal imsya. Di ungkap ketua DPD PKS Kota Cilegon Abdul Goffur:

Kegiatan pawai ramadhan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun menjelang datangnya bulan ramadhan, tujuannya untuk mengingatkan masyarakat akan datangnya bulan suci ramadhan sehingga dapat menyiapkan diri baik fisik, materi dan ruhiyah.

Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Cilegon adalah I'tikaf acara ini dilakukan 10 hari terakhir bulan ramadhan di masjid Arrohman Gerogol. Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk bisa menyadarkan masyarakat agar selalu berpegang teguh pada Agama Islam dan di 10 hari terakhir ramadhan itu menjadi penentu bagi kita untuk mendapatkan kesempatan beribadah di malam Lailatul Qodar.<sup>8</sup>

Dilihat dari karakteristik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon dalam melaksanakan pendidikan politik, dapat dikatakan bahwa PKS sebagai partai kader. Partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi anggota dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Abdul Goffur, di Kantor DPRD Kota Cilegon ruang Fraksi PKS, Senin, 28 Maret 2019, (jam: 09.00 WIB)



organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Definisi partai kader sangat tepat bagi PKS karena ciri partai kader hampir ada dalam partai ini serta menjalankan kegiatan kepartaian PKS tidak mengandalkan satu atau beberapa tokoh partai dalam mengembangkan partai namun semua keberhasilan partai merupakan hasil kerja keras para kader PKS.

Adapun Tahapan-tahapan pendidikan politik adalah:

1. Tahap Pertama: Tahap ini merupakan tahapan yang paling rendah dan mudah dicapai dengan memberikan sejumlah pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang berhubungan dengan kesadaran politik atau dengan istilah lain “Moralitas Kognitif.”
2. Tahap Kedua: Tahap ini berhubungan dengan masalah sikap ( Afektif ), dalam tahap ini usaha dan pematangan. Tahap ini mencakup; penerimaan, penanggapan, penghargaan dan penjiwaan.
3. Tahap Ketiga: Tahap ini berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah orang itu

mendapatkan pendidikan politik. Tahap ini mencakup pengalaman dan penerapan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan tahapan pendidikan politik, berdasarkan hasil wawancara kepada ketua DPD PKS yaitu bapak Abdul Ghofar bahwa:

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu, sebagai berikut:

a. Sasaran pendidikan politik

Generasi muda karena generasi muda itu mempunyai potensi untuk bisa diubah cara pandangnya dan bisa menjadi pemimpin dimasa yang akan datang sehingga ini yang bisa kita dorong untuk bisa membawa nilai-nilai Islam. Karena dijamin sekarang banyak sekali yang menganggap Islam itu radikal.

b. Jenjang dalam pelaksanaan pendidikan politik

Teori da'wah jenjang itu dimungkinkan, karena yang pertama jenjangnya itu adalah jenjang ta'rif (pengenalan) jadi dikenalkan dulu PKS itu seperti apa? Maka PKS memiliki program yang namanya TOP (Training orientasi partai) setelah pengenalan ada tahap ta'win yaitu interaksi. Dimana setelah dikenalkan ada TOP itu ada yang namanya ta'lim rutin partai setelah itu ada orang yang menjadi pelaksana.

c. Tempat pelaksanaan pendidikan politik

Kantor DPD, tingkat kecamatan. Sasaran, kader wajib. menjelang Ramadhan kita undang masyarakat untuk mengikuti kegiatan PKS seperti kegiatan MABIT. Tempat yang sudah memadai dan terkadang meminjam tempat untuk seminar. Media

---

<sup>9</sup> <https://sutrisnodoswar.wordpress.com>, diakses pada, Senin 13 Mei 2019 ( waktu: 22.30 WIB)

yang dipake adalah kajian-kajian seminar yang isinya nilai-nilai keIslaman sambil dimasukan tentang pendidikan politik.

d. Ciri khas menyampaikan pendidikan politik

intinya ciri khas pks tidak beda jauh dari organisasi keIslaman yang lain. Sangat menjunjung tinggi sunah wal jamaah dari sisi keIslaman sedangkan dari sisi entitas politik menjunjung NKRI, Pancasila, keberagaman dan kebinekaan,(4 pilar)

e. Materi pendidikan politik

memahami Islam secara utuh, Islam itu juga negara dan undang-undang, Islam dipandang dari beberapa sisi. pemahaman kita terhadap bernegara, bahwa pks juga memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan sebagai konsekuensinya kita sebagai partai yang berasaskan keIslaman tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk beristeraksi dengan siapapun seperti kaidah pks (kita saling bertaawun apayang sudah disepakati kita saling membantu, toleransi.<sup>10</sup>

Adapun manfaat pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Cilegon terhadap kader, berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu kader DPD PKS yang bernama: pak Didin Prayogi yaitu:

Manfaat yang di peroleh dari pendidikan politik yang dilakukan DPD PKS kota cilegon yaitu adanya pengkajian dalam pendidikan agama dan politik, karna di dalam PKS bukan hanya pengetahuan politik saja yang saya dapatkan melaikan bisa memperdalam pengetahuan keagamaan ataupun keIslaman. Selanjutnya, tentang

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Abdul Goffur, di Kantor DPRD Kota Cilegon ruang Fraksi PKS, Senin, 18 Maret 2019, (jam: 11.00 WIB)

edukasi masyarakat terhadap kehidupan sosial di masyarakat.<sup>11</sup>

kegiatan pendidikan politik yang dilakukan DPD PKS Kota Cilegon seperti yang sudah di uraikan di atas merupakan kegiatan pendidikan politik dalam upaya untuk meningkatkan kualitas para kadernya. Pada dasarnya kegiatan pendidikan politik tersebut dilaksanakan tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terhadap muatan-muatan keIslaman yang tidak terlepas dari PKS sebagai partai da'wah. Dalam upaya meningkatkan kualitas kader, DPD PKS Kota Cilegon lebih cenderung kearah pelatihan, pembinaan, seminar, kajian-kajian dan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap kader baik mengenai politik maupun keagamaan. Strategi itu cukup tepat oleh DPD PKS Kota Cilegon untuk bisa mendekati diri dengan masyarakat, karena dengan pelatihan, pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial dirasa lebih mengena dengan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Kepada Kader Muda PKS Kota Cilegon, bapak, Didin Prayogi, di Kantor DPD PKS Kota Cilegon, Jum'at 10 Mei 2019, (Jam: 04.56)

## **B. Faktor Kendala dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di DPD Partai Keadilan Sejahter (PKS) Kota Cilegon?**

Proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Cilegon tidak sepenuhnya berjalan dengan harapan partai dan masyarakat, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala sehingga membuat hasilnya kurang maksimal.

Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terorganisir dan efektif agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Dalam sebuah partai politik anggaran dasar (AD) merupakan kebijakan tertinggi dalam suatu partai yang menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya dalam melaksanakan aktifitas politik partai. Sementara anggaran rumah tangga (ART) merupakan aturan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai isi dari anggaran dasar partai politik tersebut. Tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggaran dasar (AD) dijadikan rujukan oleh partai bagi pelaksanaan kegiatan partai. Sehingga dapat dikatakan anggaran dasar memberi arahan kepada partai

tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan partai.

Semua upaya untuk melakukan secara politik penduduk Indonesia itu tidak luput dari kesulitan dan hambatan, antara lain berupa:

1. Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan dan penjajahan, sehingga mereka menjadi “terbiasa” hidup dalam keserba kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka ke arah konsientisasi diri mengungkapkan segala problema yang telah dialami
2. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan meninabobokan rakyat belaka, sulit pula untuk mengajak mereka untuk berfikir lain dengan nalar

jernih. Bahkan banyak diantara masa rakyat yang takut pada kemerdekaan.

3. Dengan latar pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas situasi sosial dan politik disekitar dirinya.
4. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan politik karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian Razimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada sekretaris DPD PKS Kota Cilegon yaitu bapak Fery, bahwasannya:

Menurut beliau, ada beberapa faktor kendala yaitu pandangan masyarakat secara umum memandang bahwa politik itu kotor dan identik dengan uang, dan partai politik adalah lembaga politik sehingga masyarakat seringkali antipati terhadap partai

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa, ....*, h. 73

Dengan kondisi yang terjadi belakangan ini, seperti maraknya kasus korupsi membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat berpandangan bahwa politik itu kotor akibatnya mereka tidak mau terlibat dalam dunia politik. Masyarakat selalu berpandangan bahwa politik itu kotor karena memang masyarakat kegiatan politik selalu data ketika saat pemilu saja karena itu masyarakat berpandangan buruk mengenai politik. Dari survei yang peneliti dapatkan dari sekretaris DPD PKS Kota Cilegon bapak Ferry Budiman::

Bukti bahwa masyarakat berpandangan bahwa selalu berpandangan politik itu buruk adalah ketika pemilu masyarakat masih banyak yang Golput sehingga partisipasi politik menurun dan saat PKS Kota Cilegon mengadakan sosialisasi tentang politik atau memberikan pendidikan politik mengenai 4 pilar kebangsaan, pengenalan partai dan pengetahuan politik masyarakat enggan untuk ikut serta namun berbeda ketika PKS mengadakan kajian-kajian tentang keagamaan masyarakat banyak yang ikut serta.

Dari penjelasan diatas bahwasannya masyarakat masih berpandangan politik itu buruk atau kotor sehingga dari cara pandang masyarakat seperti itu mengakibatkan menurunnya partisipasi politik.



Adapun solusi yang dilakukan PKS Kota Cilegon dengan menampilkan diri sebagai partai santun dalam berpolitik serta bersih bagi setiap kadernya baik yang duduk sebagai anggota dewan maupun yang duduk di pemerintahan. Serta terus menjaga citra baik partai dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela seperti korupsi berbuat asusila dalam politik uang bagi para kader.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan pendidikan politik kendala tidak hanya berasal dari luar akan tetapi seringkali faktor lain yang berasal dari dalam internal partai sendiri, kendala teknis pada pelaksanaan pendidikan politik antara lain terbatasnya dana serta kurangnya pematari yang menguasai materi.

Berdasarkan wawancara dari Sekertaris DPD PKS Kota Cilegon Bapak Ferry Budiman, bahwasannya:

Dana PKS diperoleh dari pemerintah, infak anggota, dewan fraksi PKS, dan infak wajib kader inti dana tersebut dikelola ditingkat pusat dan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk pendanaan kegiatan dan agenda DPD PKS Kota Cilegon, pelaksanaan program partai dan lain-lain. Sehingga untuk dana kegiatan besar seperti pendidikan politik sangat minim karna memang terkadang anggota DPD PKS kurang kesadarannya dalam memberikan infak anggota yang diwajibkan tiap bulannya.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Kepada Sekertaris Umum DPD PKS Kota Cilegon, Bapak Ferry Budiman, di kantor DPD PKS Kota Cilegon, Senin 18 Maret 2019, ( Jam: 08.54)

Menurut penelitian yang peneliti dapatkan adalah kendala yang dialami PKS di pendanaan ini adalah terkait iuran dana yang didapat dari iuran anggota terkadang anggota ada saja yang memang sulit atau banyak yang lupa akan kewajibannya untuk membayar iuran anggota ini.

Ketika wawancara kepada Bendahara PKS Kota Cilegon Bapak Tejo, ketika penulis bertanya mengenai masalah Dana yang di dapatkan adalah:

Dana yang didapat DPD PKS Kota Cilegon biasanya didapat dari iuran anggota dimana untuk iuran anggota ini diwajibkan untuk seluruh anggota kader tiap bulannya memberikan iuran sebesar RP. 5000. selain dari sumbangsi anggota partai biasanya dari ketua Fraksi atau DPD kepada struktur, sumbangsi lain yang tidak mengikat (baksos) dan pastinya dari parpol atau APBD sesuai perolehan suara. Untuk perolehan setiap tahunnya biasanya kurang lebih  $500 \times 5000 = 2.500.00$  itupun belum ada tambahan dari yang lain.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya faktor kendala yang dialami oleh DPD PKS Kota Cilegon diantaranya adalah masalah pendaan. Untuk pendanaan di PKS Kota Cilegon sendiri sedikit bermasalah karna memang kurangnya kepedulian

---

<sup>14</sup> DPD PKS. Wawancara Dengan Bendahara DPD PKS: Bapak Tejo. (Rabu, 25 September 2019 waktu: 11.00)

dari simpatisan PKS untuk iuran karna kegiatan PKS bukan saja dilakukan ketika saat pemilu saja tetapi ada kegiatan rutin harian atau bulanan yang yang selalu dilakukan oleh PKS.

Adapun solusi untuk mengatasi kendala ini yang peneliti dapatkan dari hasil penelitiannya kepada sekertaris DPD PKS Bapak Ferry Budiman yaitu:

solusi yang dilakukan PKS dalam mengatasi pendanaan antara lain mengoptimalkan dana yang ada dengan mengefektifkan setiap kegiatan melalui penggabungan beberapa kegiatan menjadi satu sehingga untuk tempat dan sarana dapat digunakan bersama.<sup>15</sup>

Selain dengan kendala pendanaan DPD PKS juga mengalami Kendala lain diantaranya kendala masalah waktu Anggota yang diberikan untuk DPD PKS Kota Cilegon. Kendala waktu ini biasanya selalu di alami ketika ingin melakukan kumpulan pekanan yang biasanya dilakukan DPD PKS Kota Cilegon setiap minggunya untuk membahas mengenai kegiatan bulanan yang dilakukan DPD PKS Kota Cilegon kegiatan ini biasanya berisikan kegiatan kajian-kajian untuk masyarakat.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Kepada Sekertaris Umum DPD PKS Kota Cilegon, Bapak Ferry Budiman, di Klinik Tazkiyah Kota Cilegon, Selasa 07 Mei 2019, ( Jam: 02.00)

Dari hasil wawancara dengan Sekertaris DPD PKS Kota

Cilegon: Bapak Ferry yaitu:

Untuk masalah kendala diwaktu ini biasanya anggota atau kader PKS selalu disibukan dengan pekerjaannya masing-masing, karna memang kader PKS pekerja semua. jadi terkadang untuk bisa melakukan kegiatan atau rapatpun hanya ada beberpa anggota dan kader saja yang bisa berpartisipasi karna memang disibukan dengan pekerjaan diluarnya masing-masing.<sup>16</sup>

Adapun solusi yang dilakukan PKS terkait kendala Waktu ini Menurut sekertaris DPD PKS Kota Cilegon yaitu:

Solusi menagatasi waktu untuk anggota dan kader adalah mencari waktu yang tepat untuk anggota dan kader bisa meluangkan waktu untuk bisa berkumpul dan bisa menjadi pemateri dikegiatan seminar, kajian dan pelaksanaan pendidikan politik untuk masyarakat. Selain itu biasanya anggota yang sering tidak ikut serta dalam kegiatan atau perkumpulanpun mendapatkan teguran. (wawancara, selasa 07 Mei 2019)<sup>17</sup>

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya solusi yang di lakukan DPD PKS Kota Cilegon untuk mengatasi suatu kendala yang dialami terkait waktu ini

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Kepada Sekertaris Umum DPD PKS Kota Cilegon, Bapak Ferry Budiman, di Klinik Tazkiyah Kota Cilegon, Selasa 07 Mei 2019, ( Jam: 02.00)

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Kepada Sekertaris Umum DPD PKS Kota Cilegon, Bapak Ferry Budiman, di Klinik Tazkiyah Kota Cilegon, Selasa 07 Mei 2019, ( Jam: 02.00)

biasanya melakukan teguran untuk anggota yang sering tidak melakukan kegiatan atau perkumpulan pekanan kader.

Berkaitan dengan pendidikan politik terutama bagi anggota atau kadernya maupun masyarakat, dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak dijelaskan secara tegas mengenai pendidikan politik. Akan tetapi dari beberapa pasal dalam Anggaran Dasar tersirat mengenai pelaksanaan pendidikan politik, hal ini dapat dilihat adanya pengaturan tentang masalah keanggotaan partai, yang kemudian ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu adanya program kerja yang bersifat teknis yaitu program kerja yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktifitas politik partai. Program kerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kader atau anggota dimulai dari struktur organisasi terendah yaitu tingkat ranting sampai pada tingkat pusat serta pendidikan politik bagi masyarakat yang belum menjadi anggota atau kader partai. Program kerja yang berkaitan

dengan pendidikan politik di DPD PKS Kota Cilegon meliputi berbagai kegiatan antara lain dibidang kaderisasi, pembangunan keumatan dan kebijakan publik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat dinyatakan bahwa PKS adalah sebagai partai politik yang mengidentifikasikan dirinya sebagai partai dakwah, partai ini dalam kebijakannya secara serius dapat melakukan kegiatan syiar Islam dibidang dakwah kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, disamping dapat memberikan perhatian yang sangat serius pada masalah pengkaderan. Dari sudut pandang PKS masalah pengkaderan diklasifikasikan ke dalam dua persoalan yaitu pembinaan kader yang sudah menjadi anggota partai serta perluasan jumlah kader melalui berbagai kegiatan, cara dan instrumen yang dimiliki oleh PKS Kota Cilegon.

### **C. Pelaksanaan Pendidikan Politik di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sudah Relevansi Dengan UU No. 2 Tahun 20011 Tentang Partai Politik.**

Pelaksanaan Pendidikan politik sudah menjadi tugas penting yang mesti diselenggarakan oleh partai politik sehingga

mampu membentuk kader dan masyarakat memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam posisinya sebagai pemimpin maupun sebagai warga negara pada umumnya. Partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik yang diberikan kepada kader atau anggota partai dan pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik pada pasal 11 ayat (1) mengatur ketentuan dari fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. R. Hayer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipasi yang bertanggung jawab dalam politik.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, ( Bandung: Mandar Maju, 1989) h.

### **Pasal 11**

Ayat (1) partai politik berfungsi melakukan Pendidikan Politik

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Pasal 31**

Ayat (1) partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Ayat (2) pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila<sup>19</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPD PKS

Kota Cilegon, yang bernama bapak Abdul Ghoffar bahwa:

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Cilegon Sudah relefansi, karna memang pelaksanaan pendidikan sangat penting sekali untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengetahuan politik, pendidikan politik yang di lakukan oleh DPD PKS selalu terlaksana dengan baik, baik

---

<sup>19</sup> Penjelasan Kitab Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik



pendidikan politik yang dilakukan untuk kader ataupun untuk masyarakat, tetapi waktu dan tempatnya saja yang berbeda.<sup>20</sup>

Ketika wawancara kepada saudara kak Dio, salah satu kader atau simpatisan Kota Cilegon, ketika penulis bertanya mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PKS, beliau menjawab:

Saya sebelum masuk dalam ruang lingkup kepartaian atau sebelum jadi Kader PKS, saya pernah mendapatkan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Cilegon, pada saat itu saya masih duduk dibangku kuliah semester satu, pada saat itu saya hanya ikut dengan paman saya, saya diajak untuk ikut kegiatan sosialisasi atau kajian-kajian disalah satu masjid yang ku kira itu kajian seperti biasanya. Dalam kajian itu merka membahas tentang kajian-kajian keislaman, memahami tentang shalat, puasa dan semua tentang keislaman tetapi disela-sela itu juga mereka memberika pemahaman terkait partai politik, empat pilar kebangsaan dan tentang wawasan kebangsaan. Dari situ saya sering ikut kajian dengan paman saya dan alhamdulillah bisa ikut bergabung juga di partai ini.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa, memang dalam pendidikan politik yang dilakukan DPD PKS Kota Cilegon ini memang sudah terlaksana sesuai dengan pasal 11 dan pasal 31 Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon bapak Abdul Goffar, di Kantor DPRD Kota Cilegon ruang Fraksi PKS, Kamis, 28 Maret 2019, ( Jam: 09.00)

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Kepada Salah Satu Simpatisan PKS Kota Cilegon: Kak Dio, di Kantor DPD PKS Kota Cilegon ( Senin, 30 September 2019, Waktu: 08:30)

Dengan tujuan DPD PKS Kota Cilegon ini melakukan pendidikan politik perinsip utamanya untuk menjadikan seseorang mengetahui atau memahami tugasnya sendiri yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah yang bersifat pribadi dalam PKS disebut juga dengan Mutaba'ah (kegiatan harian) seperti shalat berjamaah dan puasa sunnah. Selain itu tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang politik supaya masyarakat sadar akan politik dengan memberikan kritik dan saran kepada pemerintah jika pemerintah salah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan politik DPD PKS Kota Cilegon dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pelaksanaan ditentukan menurut kondisi yang tetap, terjadwal dan rutin akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pendidikan politik DPD PKS Kota Cilegon pada pelaksanaannya tidak selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terhadap muatan-muatan materi ke Islaman hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai da'wah.
2. Pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali ada kendala-kendala, antara lain: a). adanya pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik, b). terbatasnya dana, c). kurangnya waktu anggota dan kader partai untuk DPD PKS keikut sertaanya dalam kegiatan dan

dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan pendidikan politik. Adapun Solusi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon untuk mengatasi kendala dalam pendidikan politik dengan cara:

- a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dengan terus menjaga citra baik partai, b). mengoptimalkan dana dengan menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu, c). mencari waktu luang anggota dan kader untuk bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan yang sudah diagendakan.
3. Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Cilegon Sudah Relefansi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik Pasal 11 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1 dan 2). bahwasannya partai PKS kota Cilegon sudah melaksanakan dengan baik pendidikan politik bagi anggota, kader dan masyarakat sesuai pada Undang-undang yang tertera.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon berikut adalah saran yang dapat peneliti usulkan:

1. Partai politik untuk dapat menyusun laporan dan dokumentasi setiap kegiatan dengan baik dan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon perlu mengadakan pelatihan khusus bagi para kader di tingkat DPC dan Cabang Da'wah agar mampu menyusun laporan dan Dokumentasi kegiatan partai yang menarik.
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon dalam kegiatannya harus mampu hadir ditingkat paling bawah di masyarakat tidak hanya ditingkat ranting atau desa saja, akan tetapi dapat hadir ditingkat RT/RW sebagai solusi meningkatkan kepercayaan dan komunikasi dengan masyarakat yang baik